



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15, JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3842638, 3805563, FAKSIMILE (021) 3805562, 3805559
SITUS : www.kemenpppa.go.id

Nomor : B 680/KPP-PA/Roum/KP.06.03/07/2019
Lampiran : -
Hal : Pengumuman Seleksi Terbuka
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

5 Juli 2019

Yth. Sekretaris Kementerian/Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama
di tempat

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon II di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2018 sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, disampaikan bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan melakukan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon II yang dapat diikuti oleh PNS pusat yang memenuhi persyaratan. Untuk informasi lebih lengkap dapat dilihat pada laman <http://www.kemenpppa.go.id>.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengharapkan Bapak/Ibu dapat menginformasikan pengumuman dimaksud kepada seluruh pegawai di lingkungan instansi Bapak/Ibu.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Ketua Panitia Seleksi Terbuka
JPT Pratama


Dra. Sri Danti, MA



Tembusan:

Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Daftar Undangan

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya;
5. Kementerian Dalam Negeri;
6. Kementerian Luar Negeri;
7. Kementerian Pertahanan;
8. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Kementerian Keuangan;
10. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
11. Kementerian Perindustrian;
12. Kementerian Perdagangan;
13. Kementerian Pertanian;
14. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
15. Kementerian Perhubungan;
16. Kementerian Ketenagakerjaan;
17. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
18. Kementerian Kesehatan;
19. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
20. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
21. Kementerian Sosial;
22. Kementerian Agama;
23. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
24. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
25. Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
26. Kementerian Sekretariat Negara;
27. Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
28. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
29. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS;
30. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
31. Kementerian Pemuda dan Olah Raga;
32. Kementerian Pariwisata;
33. Badan Pemeriksa Keuangan;
34. Kejaksaan Agung;
35. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
36. Sekretaris Kabinet;
37. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
38. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
39. Badan Intelejen Negara;
40. Sekretariat Jenderal MPR;
41. Sekretariat Jenderal DPR;
42. Mahkamah Agung; ✓
43. Badan Kepegawaian Negara;
44. Lembaga Administrasi Negara;
45. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional;
46. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
47. Badan Tenaga Nuklir Nasional;
48. Arsip Nasional RI;

49. Badan Informasi Geospasial;
50. Badan Koordinasi Penanaman Modal;
51. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
52. Perpustakaan Nasional;
53. Badan Standarisasi Nasional;
54. Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
55. Badan Pengawas Obat dan Makanan;
56. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.